

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

200 (dua ratus) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Surat Keputusan menjadi Pejabat PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM dan KTP (Kartu Tanda Penyidik).



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENGUSULAN CALON PESERTA DIKLAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memberikan layanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu terkait administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya di Bidang Layanan Administrasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan upaya penanganan layanan administrasi yang dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam memproses administrasi Pejabat PPNS ke Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

PERSYARATAN

1. SK Pengangkatan PNS;
2. SK Penempatan / SK Jabatan terakhir dan bekerja di bidang teknik operasional;
3. Ijasah pendidikan terakhir (minimal S1) dan transkrip nilai;
4. SKP/DP3 dalam 2 tahun terakhir;
5. Pas Foto 4x6 (berwarna, latar belakang merah);
6. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah (RSUD); dan
7. SK Pangkat terakhir (minimal golongan III/a).

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Permendagri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

